SIAP SIAGA
Australia - Indonesia Partnership for Disaster Risk Management

BNPB

Australian Government

TINJAUAN PARTISIPATIF RESPONS ERUPSI GUNUNG SEMERU

Pelajaran yang Dipetik dan Laporan Rekomendasi

HAK & IZIN CIPTA

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

TINJAUAN PARTISIPATIF RESPONS ERUPSI GUNUNG SEMERU

Pelajaran yang Dipetik dan Laporan Rekomendasi

Daftar Isi

Daftar Isi 4
Daftar Singkatan 5
Latar Belakang 7
Tinjauan Peran Pemangku Kepentingan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan Non-Pemerintah 10
Linimasa Respons 16
Kronologi SK Tanggap Darurat Erupsi Semeru 16
Struktur Komando Tanggap Darurat 17
Koordinasi 18
Temuan Utama Dari Tanggap Darurat: Pencapaian, Kekurangan dan Tantangan 21
Deklarasi Darurat dan Sistem Perintah Tanggap Darurat 21
Data dan Informasi Bencana 23
Perumahan dan Pemulihan Dini 24
Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 25
Menerapkan Pendekatan Pentahelix untuk Tanggap Darurat Bencana 25
Isu Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) selama Tanggap Darurat 26
Pendekatan untuk Mengatasi Kekurangan dan Tantangan 28
Pelajaran yang Dipetik 29
Rekomendasi 31
Lampiran 1: Wawancara Informan Utama 32
Lampiran 2: Diskusi Kelompok Terfokus 33
Lampiran 3: Daftar Pustaka 34

Daftar Singkatan

APG	Awan Panas Guguran
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BASARNAS	Badan SAR Nasional
BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Direktorat FPKP BNPB	Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB
Forum PRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana
DVI	*Disaster Victim Identification* (Identifikasi Korban Bencana)
FGD	*Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus)
FORKOMPIMDA	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
HRNA	*Human Recovery Needs Assessment* (Penilaian Kebutuhan Pemulihan Manusia)
HUNTAP	Hunian Tetap
HUNTARA	Hunian Sementara
JNA	*Joint Needs Assessment* (Penilaian Kebutuhan Gabungan)
JITUPASNA	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
KII	*Key Informant Interviews* (Wawancara Informan Utama)
KODIM	Komando Distrik Militer
KOREM	Komando Resor Militer
LDP	Layanan Dukungan Psikososial
LPBI NU	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NFI	*Non-Food Item* (Barang Selain Makanan)
NGO	*Non-Government Organization* (Organisasi Non-Pemerintah)
NTT	Nusa Tenggara Timur
OPD/SKPD	Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah
OSC	*On Scene Commander* (Komandan Lapangan)
PDB	Penanganan Darurat Bencana
PDNA	*Post Disaster Needs Assessment* (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau JITUPASNA)
PMI	Palang Merah Indonesia
POLRES	Kepolisian Resor
POSMA	Pos Bersama

PP KBG & PA	Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Anak
PUSDALOPS	Pusat Pengendalian Operasi
PVMBG	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RENKON	Rencana Kontingensi
RENOPS	Rencana Operasi
RISHA	Rumah Instan Sederhana Sehat
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
SAR	*Search and Rescue* (Pencarian dan Penyelamatan)
SK	Surat Keputusan
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SMC	*SAR Mission Coordinator* (Koordinator Misi SAR)
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
SOP	*Standard Operating Procedure* (Prosedur Operasi Standar)
TAGANA	Taruna Siaga Bencana
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TRC	Tim Reaksi Cepat

Latar Belakang

Pada Sabtu, 4 Desember 2021 pukul 15.00 WIB, aktivitas Gunung Semeru meningkat disertai awan panas guguran yang melanda desa-desa di Kecamatan Pronojiwo dan Candipiro, serta enam desa lainnya di Kecamatan sekitar Malang. Dipicu oleh hujan lebat, aliran lahar dingin merusak Jembatan Gladak Perak, memblokir akses jalan ke desa-desa di wilayah yang terkena dampak, menyebabkan kerusakan pada rumah serta mati listrik. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan mengungsi di 148 kamp pengungsian, yang sebagian besar didirikan di ruang terbuka. Beberapa kantor pemerintah dan ruang publik juga digunakan sebagai pusat evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengelola pusat-pusat evakuasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan instruksi perencanaan untuk tahap transisi darurat, mengantisipasi erupsi lebih lanjut, serta protokol terkait penanganan COVID-19 mengingat banyaknya jumlah kasus aktif di kabupaten terdampak (Lumajang, Malang dan Blitar).

Gambar 1: *Infografis Bencana Erupsi Semeru Tahun 2021, Evakuasi Terbesar* [1]

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menerbitkan buletin status aktivitas Gunung Semeru yang mengindikasikan level 2 (waspada) sebelum gempa semburan lumpur, tetapi statusnya meningkat menjadi level 3 pada akhir Desember 2021. Sebagai tanggapan, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status darurat (4 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022), berdasarkan Surat Keputusan No. 118.45/524/427.12/2021. Status ini kemudian diganti dengan SK lain (No 118.45/525/427.12/2021) yang memperpendek masa tanggap darurat menjadi antara 4 hingga 17 Desember 2021. SK tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten untuk mengembangkan sistem dan struktur komando darurat yang termasuk mekanisme koordinasi. Mengingat Pemerintah Kabupaten Lumajang juga sedang dalam proses pemulihan pascagempa (yang terjadi pada 10 April 2021 di Malang), beberapa pelajaran yang diperoleh dari insiden tersebut turut ditindaklanjuti/diterapkan pada respons ini.

[1] https://tagana-semeru.lumajangkab.go.id/main/detail_flyer/28, diakses 25 Juli 2022

Mengingat konteks bencana yang lebih luas dan adanya kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan nasional mengalokasikan sumber daya tambahan untuk respons ini, termasuk mobilisasi aktif polisi dan militer, yang menciptakan respons berskala lebih besar meskipun tetap dikategorikan sebagai darurat kabupaten. Pemerintah Indonesia, melalui pemerintah provinsi, polisi dan militer, memberikan dukungan logistik dan bantuan ke kabupaten yang terkena dampak (Lumajang dan Malang). Berbagai donatur individu, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat juga memberikan layanan di titik/pusat evakuasi.

Pada tahap awal respons, SIAP SIAGA bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, Forum PRB Provinsi dan relawan lokal dari LPBI NU untuk melaksanakan penilaian awal kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam implementasi respons dan pemulihan dini. Penilaian ini juga mencakup analisis kekurangan dalam operasi darurat, pemulihan dini, implementasi peraturan dan SOP, serta Data Satu Bencana. Berdasarkan analisis ini, SIAP SIAGA bersama dengan BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten dan Forum PRB, mengidentifikasi kemungkinan dukungan yang dapat diberikan oleh SIAP SIAGA dan pemangku kepentingan lainnya kepada pemerintah daerah untuk merespons lebih efektif dalam fase pemulihan.

Sejalan dengan programnya yang lebih luas, dukungan teknis SIAP SIAGA difokuskan pada penguatan Manajemen Data dan Informasi, koordinasi, dan transisi yang efektif dari respons ke pemulihan awal serta rehabilitasi-rekonstruksi jangka panjang. Dukungan ini juga mengacu pada pelajaran yang diperoleh dari respons Topan Seroja di NTT pada awal tahun 2021.

Respons Pemerintah, Mengatasi Kekurangan dan Tantangan

Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Timur mengalami beberapa bencana skala menengah hingga besar: gempa bumi di Malang pada bulan April, banjir bandang di Batu pada bulan November, dan erupsi Semeru pada bulan Desember, serta berbagai bencana hidrometeorologi skala kecil di seluruh Provinsi. BPBD provinsi dan kabupaten, bekerja sama dengan pemerintah daerah, memprakarsai respons langsung melalui distribusi makanan dan non-makanan (NFI), mendirikan dapur umum untuk anak-anak, dan menyediakan sarana penyembuhan trauma pascabencana melalui fasilitas pendidikan keliling (Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana atau Mosipena).

SIAP SIAGA mendukung BPBD Provinsi untuk menginisiasi koordinasi pengelolaan Satu Data dengan mengoptimalkan proses yang sedang berjalan dan mendorong pendekatan klaster. Bersama Forum PRB dan relawan lokalnya dari LPBI NU, SIAP SIAGA juga memberikan dukungan untuk pendataan terpilah, menjembatani koordinasi multi-aktor melalui Forum PRB, memfasilitasi penyusunan Rencana Pemulihan Dini, dan implementasi Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan survei HRNA (*Human Recovery Needs Assessment*) untuk menghasilkan dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana).

Terakhir, SIAP SIAGA memfasilitasi Tinjauan Partisipatif untuk mendokumentasikan pelajaran dan praktik baik serta mengidentifikasi kekurangan dari respons yang ada untuk dikembangkan menjadi rekomendasi guna meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat inklusif.

Lingkup Tinjauan Partisipatif

- *Potret dan refleksi*: gambaran umum intervensi yang dilakukan pemerintah, kekurangan dan bagaimana pemerintah merespons dan menyesuaikan sistem respons untuk mengatasi kekurangan.

- *Peran pemangku kepentingan (pentahelix) dan peran tumpang tindih*: keterlibatan pemangku kepentingan dan efektivitas kontribusi mereka.
- *Pelajaran dan rekomendasi*: mengidentifikasi pelajaran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat, pemulihan dini, transisi darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Metodologi

Tinjauan partisipatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi melalui mekanisme berikut:

1. Tinjauan pustaka terhadap kebijakan, peraturan dan pedoman tanggap darurat, dukungan teknis yang diberikan untuk pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat nasional dan daerah, pemetaan ketepatan waktu respons sesuai SOP, dan analisis kekurangan/tantangan berbasis bukti yang terkumpul.
2. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dan Wawancara Informan Utama (KII) dengan pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten, berdasarkan pengambilan sampel yang memadai untuk mewakili keragaman dan/atau dinamika dalam respons menggunakan alat wawancara terstruktur.
3. Lokakarya untuk menyebarluaskan hasil tinjauan dan menangkap pelajaran serta rekomendasi.

Kerangka Analisis Dasar

Kerangka kerja analitis untuk tinjauan partisipatif terdiri dari tiga komponen:

1. Memahami kondisi (pencatatan pelaksanaan darurat bencana hingga pemulihan dini).
2. Refleksi (mencatat pelajaran, baik praktik yang baik maupun tantangan atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan tanggap darurat dan pemulihan dini).
3. Analisis implementasi dan pembelajaran untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan dan praktik pemerintah serta non-pemerintah.

Tinjauan Peran Pemangku Kepentingan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta Non-Pemerintah

Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang pada 4 Desember 2021 berdampak pada 10 desa di tiga kecamatan: Kecamatan Candipuro, yang meliputi: (1) Desa Sumber Wulu; (2) Desa Candipuro; (3) Desa Sumber Mujur; (4) Desa Sumber Rejo; (5) Desa Penanggal; Kecamatan Pronojiwo, yang meliputi: (1) Desa Supiturang, (2) Desa Sumber Urip dan (3) Desa Oro Oro Ombo; dan Kecamatan Pasirian, yang meliputi: (1) Desa Condro, (2) Desa Pasirian. Sebanyak 64 orang meninggal, 10.395 orang mengungsi (di 410 titik evakuasi) dan 2.970 rumah rusak.

Bupati Lumajang langsung berkoordinasi dengan Wakil Bupati, Sekda dan BPBD Kabupaten, serta didukung oleh Kodim 0821 Lumajang dan Polres Lumajang yang melakukan respons cepat ke tiga kecamatan tersebut berdasarkan SK Bupati No. 188.45/527/427.12/2021 tanggal 4 Desember 2021.

Peran pemerintah dalam tanggap darurat ditentukan oleh Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Segera setelah erupsi Gunung Semeru, Struktur Komando Tanggap Darurat diaktifkan. Di Pasirian dibentuk Posko Kabupaten Lumajang dengan fungsi komando dan kendali Satgas Kecamatan, sedangkan Panglima Korem 083 Baladhika Jaya diangkat menjadi Panglima Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) untuk Erupsi Gunung Semeru.

Dengan dukungan dan partisipasi banyak pihak, Pemkab Lumajang berhasil merespons dengan baik, melaksanakan PDB Erupsi Gunung Semeru secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pada 5 Desember 2021, Presiden[2] menginstruksikan Kepala BNPB, Kepala BASARNAS, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang untuk segera mengambil tindakan tanggap darurat, pencarian dan penyelamatan, memberikan perawatan kepada korban yang terluka, serta menangani dampak erupsi Semeru.

Peran dan dukungan PDB melalui SKPDB Erupsi Gunung Semeru, pemerintah pusat, BPBD Provinsi Jawa Timur dan pemangku kepentingan seperti Forum PRB se-Jawa Timur dan masyarakat/LSM adalah sebagai berikut:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi BNPB menegaskan bahwa BNBP bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. BNPB membantu dan memberikan dukungan koordinasi kepada Posko SKPDB Erupsi Gunung Semeru melalui Pusdalops-nya. Kepala Pusdalops berkoordinasi dengan Asisten III Kabupaten Lumajang dan instansi terkait lainnya mengenai Posko Tanggap Darurat, Struktur Posko, lokasi/titik wilayah terdampak serta pemanfaatan dan pengoperasian Pusdalops dan *Media Center* Posko PDB sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala BNPB yang berlaku.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=b0502LB2-nY, diakses 25 Juli 2022

Bantuan operasional khusus yang diberikan oleh Pusdalops BNPB antara lain:

- Koordinasi, khususnya dengan Posko BASARNAS untuk SAR, sehubungan dengan pengelolaan data
- Berkoordinasi dengan Pusdatinkom BNPB, BPBD Provinsi dan Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pengembangan kesepakatan informasi data untuk sinkronisasi dengan sistem Satu Data
- Komunikasi seluler
- Pengumpulan data, di bawah koordinasi Desk Relawan dan Forum PRB Provinsi, mengenai orang-orang di kamp-kamp pengungsian dan pusat-pusat evakuasi
- Menangani permintaan informasi ke kementerian lain, yaitu PVMBG, terkait aktivitas terbaru Gunung Semeru, dan BMKG, terkait prediksi cuaca
- Penyusunan Rencana Operasional (RENOPS) penanganan darurat erupsi Gunung Semeru yang berisi strategi, kebijakan, tugas pokok, pelaksanaan dan fungsi pokok organisasi Satgas
- Evaluasi respons.

Intervensi dan pendampingan PDB Erupsi Gunung Semeru oleh BNPB selaku perwakilan Pemerintah Pusat berdampak positif terhadap penanganan tanggap darurat oleh SKPDB terkait dengan: (1) mekanisme koordinasi dan tata kelola posko bencana kabupaten; (2) proses penyusunan Rencana Operasional (RENOPS); (3) pengelolaan operasional Pusdalops dan Media Center dalam situasi PDB sebagai pusat pengelolaan Satu Data yang terintegrasi sebagai sumber informasi yang sah dan resmi bagi publik.

BASARNAS

BASARNAS Jawa Timur menerjunkan lima tim pencarian, penyelamatan, dan evakuasi (SAR) korban erupsi Gunung Semeru. Sesuai SOP, operasi SAR yang biasanya berlangsung selama tujuh hari diperpanjang dua kali menjadi tiga hari, total 13 hari, dengan 350 personel SAR berhasil menemukan 64 korban erupsi.

Kementerian Sosial[3]

Kementerian Sosial memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk:

- Posko Induk Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan Sosial yang terintegrasi di Lapangan Desa Penanggal.
- Pengerahan TAGANA untuk pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman, terutama kelompok rentan yang terdiri dari lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas).
- Distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas.
- Mendirikan Dapur Umum di empat lokasi untuk menyediakan kebutuhan makanan siap saji bagi para pengungsi dan menyediakan Layanan Dukungan Psikososial (Layanan Dukungan Psikososial atau LDP).
- Bantuan kemanusiaan berupa logistik tanggap darurat senilai Rp 1.527.880.400; perlengkapan pusat pengungsian senilai Rp 913.447.550; dan santunan tahap 1 untuk keluarga korban bencana (25 orang x Rp 15 juta) senilai Rp 375.000.000, total Rp 2.816.327.950.

[3] https://kemensos.go.id/bantuan-kemensos-bagi-korban-bencana-erupsi-semeru-hingga-10-desember-total-rp-2816327950, 16 April 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan KLHK No. 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Permukiman Korban Erupsi Gunung Semeru dan Lahan Usahanya atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Kawasan Hutan Produktif Tetap di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Alokasi lahan untuk perumahan sementara dan permanen seluas 90,98 Ha. Pemerintah Kabupaten Lumajang segera menindaklanjuti dengan membuat rencana lokasi relokasi untuk huntara dan huntap para penyintas yang terkena dampak Letusan Gunung Semeru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)[4]

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur mengerahkan 10 Hidran Umum (HU) berkapasitas 2.000 liter, empat Tangki Air Mobil (MTA) berkapasitas 4.000 liter, enam tenda darurat, satu mobil toilet, dan dukungan 10 personel tanggap darurat.

Selanjutnya, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS dari Ditjen Sumber Daya Air mengerahkan alat berat untuk mempercepat evakuasi korban dan pembersihan wilayah terdampak. PUPR juga melakukan tindakan tanggap darurat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dengan membersihkan jaringan jalan (jalan nasional, provinsi, dan kabupaten) untuk memulihkan konektivitas.

PUPR berkoordinasi dengan BPBD di Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang untuk memverifikasi data dan menerapkan langkah-langkah respons jangka pendek dan jangka panjang.

Lembaga Lain

Berdasarkan hasil survei lahan relokasi oleh Tim Kabupaten Lumajang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan verifikasi dan kajian seperti kajian risiko bencana, dan ketersediaan cadangan air tanah.

Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat dan BUMN Karya (PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya), mempercepat pembangunan Huntap bagi masyarakat yang terkena dampak erupsi. 1.951 rumah Huntap mulai dibangun pada Januari 2022 menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana dan Sehat (Risha) yang dapat dibangun dengan cepat.

Selain perumahan, kawasan relokasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas lain untuk menampung aktivitas sehari-hari warga, seperti fasilitas umum, masjid, sekolah, fasilitas olahraga, lapangan, taman, pasar, dan tempat pemakaman. Kementerian PUPR juga akan membangun instalasi air bersih yang bersumber dari Sungai Tunggeng dengan target melayani 2.000 rumah serta penghijauan berupa hutan bambu.

[4] https://regional.kontan.co.id/news/tanggap-darurat-erupsi-semeru-kementerian-pupr-turunkan-tim-dan-alat-berat, 16 April 2022.

BASARNAS Jawa Timur[5]

Kepala Kantor SAR Surabaya adalah SAR Mission Coordinator (SMC) yang mengawasi operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban erupsi Gunung Semeru. Menurut SOP, operasi SAR awalnya disepakati selama tujuh hari dan kemudian diperpanjang dua kali, masing-masing selama tiga hari, sehingga total operasi SAR menjadi 13 hari.

Gambar 2: *Kegiatan tim BASARNAS dan Relawan Search and Rescue untuk korban Erupsi Semeru 2021*

Kepala Divisi Operasi Kantor SAR Surabaya menjabat sebagai On Scene Commander (OSC). Dalam misi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban erupsi Gunung Semeru, ditemukan 48 jenazah dan dibawa ke RSUD dr Haryoto Lumajang untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polri.

BPBD Provinsi Jawa Timur

Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Jawa Timur menerima informasi dari Grup WhatsApp Penanggulangan Bencana Jawa Timur terkait erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang pada 4 Desember 2022 sore setelah kejadian. Setelah mengkonfirmasi situasi/kondisi dengan Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Pusdalops kemudian menyerahkan laporan situasi kepada Kepala BPBD Jawa Timur, menyoroti bahwa jembatan Gladakperak runtuh, memutus akses antara Candipuro dan Pronojiwo. Informasi ini digunakan sebagai rekomendasi untuk memungkinkan dukungan BPBD provinsi kepada BPBD di Lumajang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 20, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi** sebagai berikut:

a. *Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta*
b. *Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.*

[5] https://www.antaranews.com/berita/2591349/operasi-sar-korban-awan-panas-guguran-gunung-semeru-ditutup, 16 April 2022.

Pusdalops BPBD Jawa Timur segera melakukan operasi di Pronojiwo untuk memberikan dukungan berupa penempatan TRC, *Rescue Car*, *Portable Repeater*, Mobil Dapur Umum, Mobil Sosialisasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), Tenda Posko, Tenda Pengungsi, Mobil Serbaguna, dan Mobil Armada Komunikasi (Komob). Mereka juga memastikan normalisasi jaringan listrik dan telekomunikasi di Pronojiwo untuk kelangsungan komunikasi, informasi dan koordinasi tanggap darurat.

Pada hari keempat tanggap darurat, operasi darurat dialihkan ke Posko Candipuro di mana tim Pusdalops provinsi bergabung dengan tim Pusdalops BNPB yang dipimpin oleh Kepala Pusdalops BNPB. Pusdalops BNPB telah hadir di Candipuro sejak hari kedua operasi tanggap darurat yang berfungsi sebagai Posko Bantuan Nasional, meskipun operasi tanggap darurat dibagi antara Posko di Pronojiwo dan Posko Candipuro.

Pusdalops BNPB membantu Pusdalops Kabupaten Lumajang khususnya dengan koordinasi harian multi-stakeholder di Pos Pasirian berkonsultasi dengan Panglima SKPDB Erupsi Gunung Semeru dan Bupati Lumajang. Koordinasi difokuskan pada operasi/bantuan tematik yang diberikan oleh kelompok relawan dan LSM; serta memberikan update tentang data dan informasi untuk media.

Namun, dengan keterbatasan sumber daya manusia, Pusdalops Kabupaten Lumajang yang merupakan pengelola data dan informasi di Posko Pasirian sering mengalami kendala dalam pengelolaan data, dan Pusdalops Jawa Timur merekomendasikan untuk merekrut relawan pengelolaan data dan informasi untuk memastikan format/platform Satu Data yang terintegrasi. Verifikasi dan validasi data dari Pusdalops, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dilakukan setiap hari, disertai evaluasi harian oleh Panglima SKPDB Erupsi Gunung Semeru atau Bupati Lumajang, meskipun penyajian data terintegrasi tidak dimulai sampai hari kedelapan operasi darurat. Tercapainya pengelolaan data yang terintegrasi tidak terlepas dari komitmen dan upaya koordinasi serta kerja sama antara Posko, Pusdalops BNPB, BPBD Jawa Timur serta berbagai pemangku kepentingan melalui Desk Relawan.

BPBD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan SIAP SIAGA juga membantu penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

Forum PRB Jawa Timur dan Lembaga Non Pemerintah Lainnya

Forum PRB Jatim yang saat itu turut serta dalam tanggap darurat gempa di Kabupaten Malang bergabung dalam tanggap darurat Erupsi Gunung Semeru pada 6 Desember dengan tugas pokok mengoordinir seluruh relawan. Sebagai langkah awal, pihaknya membuat instrumen *check-in* registrasi relawan melalui Google Form relawan Erupsi Gunung Semeru sebagai *database* relawan. Namun, terdapat kendala terkait komunikasi dan koordinasi dengan Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru dan BPBD, karena keberadaan Desk Relawan belum dikenal di kalangan pemangku kepentingan pemerintah. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan mandat Desk Relawan, khususnya dengan BPBD Lumajang.

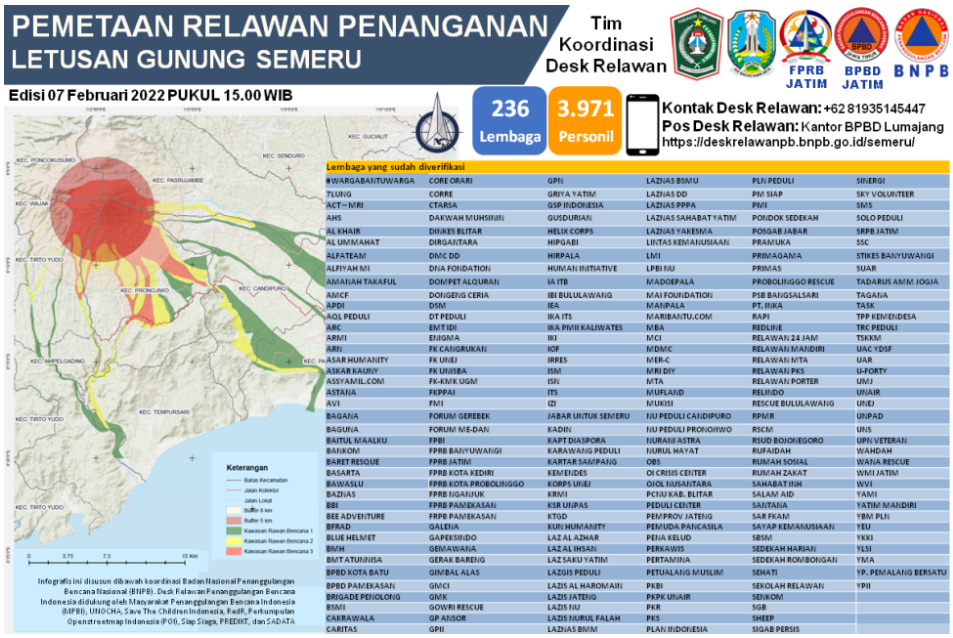

Gambar 3: *Infografis Pemetaan Relawan Penanganan Erupsi Gunung Semeru (7 Februari 2022)*

Fungsi operasional Desk Relawan meliputi pengumpulan data relawan, khususnya keahlian organisasi, dan kegiatan aksi/respons yang dilakukan oleh relawan; dan koordinasi informasi kebutuhan untuk mendukung perencanaan dan penyaluran bantuan.

Forum PRB Jatim mendirikan Posko Bersama (Posma) untuk mobilisasi relawan yang diperlukan di Candipuro di mana banyak relawan dikerahkan, dan memfasilitasi koordinasi antar-relawan dari luar daerah, termasuk menyediakan fasilitas seperti dapur umum. Posma dapat dikatakan sebagai inovasi dalam penanganan relawan bencana di Indonesia.

Selain mengelola relawan, Forum PRB Jatim bersama Pusdalops BNPB, Pusdalops BPBD Jatim, Pusdalops BPBD Lumajang dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, turut berkontribusi dalam pengelolaan data terpadu dengan kontribusi data dan informasi pemangku kepentingan non-pemerintah ke dalam platform Satu Data. Terhitung sejak tanggal 24 Januari, 1.518 personel relawan dari 183 lembaga telah terdaftar di Desk Relawan.

Linimasa Respons

Kronologi SK Tanggap Darurat Erupsi Semeru

Dalam rangka tanggap darurat bencana, pemerintah daerah (Bupati Lumajang) mengeluarkan pernyataan darurat Erupsi Semeru berupa Surat Keputusan Bupati.

Keputusan Cepat

Surat Keputusan Bupati awal (Nomor 188.45/524/427.12/2021) tentang Status Darurat Erupsi Gunung Semeru dikeluarkan pada hari yang sama dengan erupsi, dan menetapkan Komandan Satgas, Komandan Kodim Lumajang (Dandim), dan masa darurat bencana dari 4 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022.

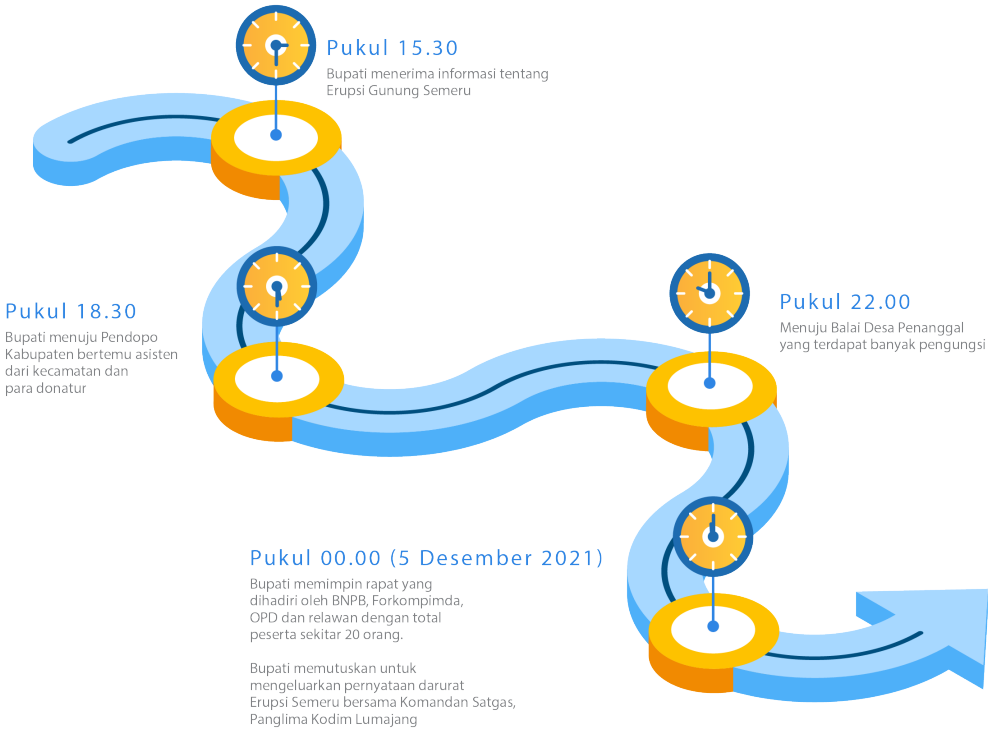

"Bupati menerima informasi tentang Erupsi Gunung Semeru, kemudian menelepon saya pada pukul 15:30, kemudian saya menemani Bupati pada pukul 18:30 ke Pendopo Kabupaten yang sudah penuh dengan asisten dari kecamatan dan para donatur. Pukul 22.00 WIB saya pindah ke balai desa Penanggal karena saya mendapat informasi awal bahwa sudah banyak pengungsi di sana. Pukul 00.00 (5 Desember 2021) saya pindah ke kantor kecamatan Candipuro, di mana Bupati memimpin rapat yang dihadiri oleh BNPB, Forkompimda, OPD dan relawan, peserta sekitar 20 orang (total). Berdasarkan informasi dan masukan tersebut, Bupati memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan darurat Erupsi Semeru bersama Komandan Satgas, Panglima Kodim Lumajang."

Ir. Nugroho Dwi Atmoko (59), Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang

Revisi SK Awal

Berdasarkan perkembangan di daerah yang terkena dampak, pada tanggal 5 Desember 2021, Bupati Lumajang menerbitkan SK Bupati Nomor 188.45/527/427.12/2021 tentang Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru, yang merevisi masa tanggap darurat di bawah SK awal (SK Bupati Nomor 188.45/524/427.12/2021) dari satu bulan menjadi dua minggu (4-17 Desember 2021). Revisi ini berdasarkan masukan yang diberikan BNPB kepada pemerintah daerah. Bupati Lumajang juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/528/427.12/2021 tentang Susunan Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru, Perubahan Panglima Satgas dari Panglima Kodim (Dandim) menjadi Panglima Korem (Danrem). kondisi khusus, setelah Jembatan Gladag Perak runtuh, dan kecamatan Pronojiwo mengalami kendala dalam penanganan tanggap darurat karena akses ke pemerintah pusat terkendala, sehingga pengelolaan di kecamatan Pronojiwo kabupaten dibantu oleh Kodim Malang, yang berarti terdapat dua Kodim yang terlibat (Kodim Lumajang dan Kodim Malang), sehingga membutuhkan penempatan Satgas Komando Erupsi Semeru di Korem, dalam hal ini Danrem.

Tata Cara Penetapan Status Darurat Kabupaten dan Kota

- Berdasarkan informasi awal dari penilaian cepat di tingkat kabupaten/kota yang terkena dampak
- Selambat-lambatnya 24 jam setelah penilaian cepat akan dilaksanakan rapat koordinasi BPBD dengan Instansi terkait penetapan status
- Selambat-lambatnya 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan, bupati/walikota menetapkan status darurat bencana, dan menyiapkan surat penetapan status darurat bencana.

Setelah diterbitkannya SK Bupati Nomor 188.45/527/427.12/2021, diterbitkan perpanjangan status darurat bencana, yang berlaku sampai dengan peralihan ke fase pemulihan bencana yang diatur dalam SK Bupati Nomor 188.45/556 /427.12/2021 dan diperpanjang dengan SK transisi darurat.

Salah satu alasan dari revisi terhadap SK awal adalah belum adanya penilaian cepat terhadap situasi di lapangan sebagai dasar pertimbangan penetapan status darurat dalam 24 jam pertama.

Struktur Komando Tanggap Darurat

Struktur Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Erupsi Gunung Semeru Lumajang ditetapkan melalui SK Bupati No. 188.45/527/427.12/2021 tanggal 4 Desember 2021, dan kemudian direvisi melalui SK Bupati No. 188.45/528/427.12/2021 tanggal 5 Desember 2021, sebagaimana dijelaskan di atas. Gambar 4 menguraikan struktur Komando Tanggap Darurat.

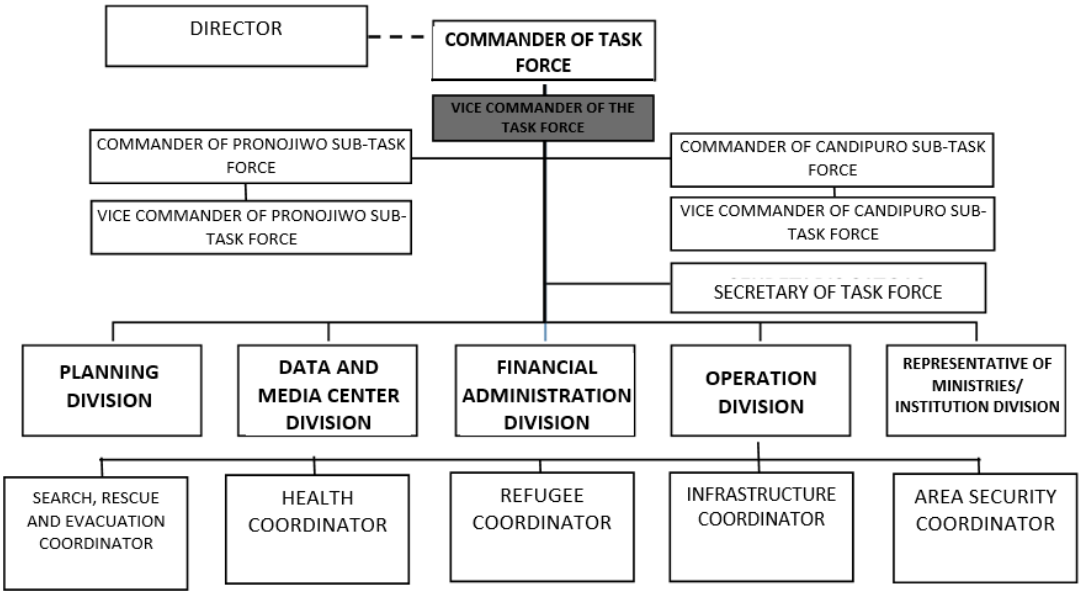

Gambar 4: *Struktur Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru sesuai SK Bupati Nomor 188.45/528/427.12/2021*

Koordinasi

Pemerintah Lumajang didukung dengan cepat dan efektif oleh Komando Tanggap Darurat Korem 083 Baladhika Jaya. Revisi struktur komando tanggap darurat pada 5 Desember 2021 menetapkan solusi untuk beberapa kendala koordinasi, antara lain (1) tambahan sumber daya untuk koordinasi; (2) efektivitas menjangkau wilayah terdampak yang terputus dari dukungan logistik akibat ambruknya jembatan utama; dan (3) distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, menurunkan biaya operasional, khususnya transportasi.

Evaluasi/Koordinasi Harian

Rapat Evaluasi Harian dilaksanakan di Posko Utama Kecamatan Pasirian, baik secara tatap muka maupun secara virtual (zoom), dipimpin oleh Danrem 083 dan dimoderatori oleh Kepala Pusdalops BNPB. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal:

- Permintaan informasi dari Kementerian/Lembaga terkait kegiatan Semeru dan prediksi cuaca;
- Update perkembangan upaya penanggulangan bencana dari masing-masing Kementerian/Lembaga;
- Kesepakatan mengenai pembaruan jumlah korban tewas;
- Kegiatan mendukung korban/penyintas;
- Penerimaan dan penyaluran bantuan menggunakan kebijakan/pendekatan 'Satu Pintu'.

Komunikasi

Penggunaan komunikasi radio dengan satu frekuensi (sesuai Peraturan Kepala BNPB No. 6/2013) dinilai efektif dan mudah dikendalikan mengingat sebaran posko pengungsi di beberapa lokasi, seperti di Balai Desa Penanggal, Posko Lapangan, Desa Sumberwuluh, Pos Balai Desa Pasirian, Posko Kecamatan Pronojiwo dan Posko Supithurang, sehingga memungkinkan Komando Operasi Darurat untuk merespons secara efektif dan efisien.

Roll call anggota SKPDB oleh Pusdalops dilakukan secara rutin setiap hari:

Tabel 1: Jadwal Informasi Harian Pusdalops Kabupaten Lumajang terkait Status Darurat Erupsi Semeru

Waktu	Substansi	Frekuensi Kontrol Jaring Komando Pos
Sore 16:00 – selesai	1. Pembaruan informasi harian 2. Pembaruan dan verifikasi data	142.460 Mhz Pusat Komando Pusdalops Pasirian
Malam 21:00 – selesai	1. Pembaruan informasi tambahan 2. Rencana untuk kegiatan esok hari	

SKPDB juga menggunakan WhatsApp Group (WAG), dengan menggunakan nomor call center Pusdalops BPBD Lumajang 081234570077 yang juga berfungsi sebagai administrator WAG, untuk mempercepat komunikasi dan berbagi informasi.

Linimasa Respons

1 Kronologi SK Respons Darurat untuk Erupsi Semeru

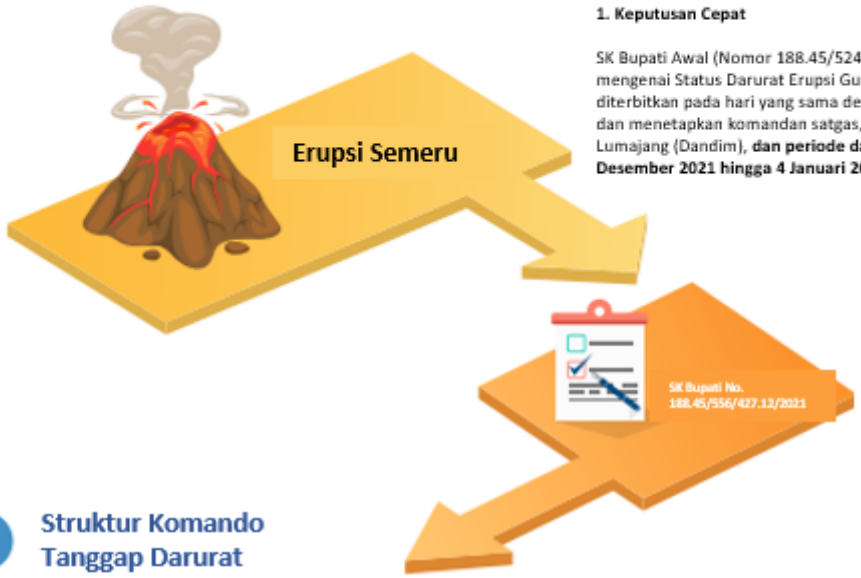

1. Keputusan Cepat

SK Bupati Awal (Nomor 188.45/524/427.12/2021) mengenai Status Darurat Erupsi Gunungapi Semeru diterbitkan pada hari yang sama dengan kejadian erupsi, dan menetapkan komandan satgas, Komandan Kodim Lumajang (Dandim), **dan periode darurat bencana dari 4 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022.**

2. Revisi SK Awal

Setelah penerbitan SK Bupati Nomor 188.45/524/427.12/2021, diterbitkan perpanjangan status darurat bencana, yang berlaku hingga transisi menuju tahap pemulihan bencana sebagaimana ditetapkan dalam **SK Bupati No. 188.45/556/427.12/2021 dan diperpanjang dengan SK transisi keadaan darurat.**

2 Struktur Komando Tanggap Darurat

Struktur Pengelolaan Darurat Bencana (PDB) untuk Erupsi Gunungapi Semeru Lumajang ditetapkan melalui SK Bupati No. 188.45/524/427.12/2021 tertanggal 4 Desember 2021, dan kemudian direvisi melalui SK Bupati No. 188.45/524/427.12/2021 tertanggal 5 Desember 2021, sebagaimana dijelaskan dalam diagram Struktur Komando Tanggap Darurat

3 Koordinasi

Pemerintah Lumajang didukung dengan cepat dan efektif oleh Komando Tanggap Darurat Korem 083 Baladhika Jaya. Revisi struktur komando tanggap darurat pada 5 Desember 2021 menetapkan solusi untuk beberapa kendala koordinasi, antara lain (1) tambahan sumber daya untuk koordinasi; (2) efektivitas menjangkau wilayah terdampak yang terputus dari dukungan logistik akibat ambruknya jembatan utama; dan (3) distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, menurunkan biaya operasional, khususnya transportasi.

Temuan Utama Dari Tanggap Darurat: Pencapaian, Kekurangan dan Tantangan

Berikut adalah wawasan yang diperoleh dari tanggap darurat Erupsi Gunung Semeru yang terangkum melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan selama Tinjauan Partisipatif:

Deklarasi Darurat dan Sistem Perintah Tanggap Darurat

1. Deklarasi Darurat

Secara keseluruhan, terdapat empat SK terkait tanggap darurat erupsi Gunung Semeru yang diterbitkan oleh Bupati.

Tabel 2: Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Erupsi Gunung Semeru 2021

SK Bupati/ SK Menteri	Kebijakan	Uraian
188.45/524/427.12/2021 4 Desember - 3 Januari	Status Darurat Bencana Erupsi Semeru	Penetapan Tanggap Darurat 4 Desember – 3 Januari 2022 Komandan/IC → Dandim 0821 Lumajang
188.45/527/427.12/2021 tanggal 5 Desember 2021	Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru	Komandan/IC → Danrem 83 4 – 17 Desember 2022
188.45/528/427.12/2021 tanggal 5 Desember 2021	Struktur Komando Erupsi Gunung Semeru Tanggap Darurat	Komandan/IC → Danrem 83 4-17 Desember 2022
188.45/549/427.12/2021 tanggal 17 Desember 2021	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Erupsi Semeru	Komandan/IC → Dandim 0821 Lumajang

SK awal diterbitkan pada hari erupsi dan dilakukan saat rapat koordinasi dengan Forkompimda, staf OPD/SKPD dan relawan di kantor Kecamatan Cadipuro.[6] SK ini diterbitkan berdasarkan pemahaman Bupati terhadap kondisi yang ada berdasarkan laporan Forkompimda, wakil bupati dan Sekda. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Posko Tanggap Darurat Bencana dalam Bab II Huruf C Nomor 2 dan 3 yang menyatakan bahwa hasil pelaksanaan tugas TRC (Rapid Assessment) harus mendapat masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait, sebagai bahan pertimbangan Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati guna menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten.

Di Kabupaten Lumajang, Bupati mengeluarkan SK darurat pertama tanpa mendapat masukan atau saran dari Kepala BPBD terhadap hasil kajian cepat erupsi Gunung Semeru mengingat urgensi situasi, dan juga mempertimbangkan laporan dari seluruh Forkompimda di lapangan.

Oleh karena itu, pada 5 Desember 2021, Bupati harus menerbitkan SK kedua, merevisi SK pertama, karena adanya informasi mengenai ambruknya jembatan Gladak Perak yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang sehingga perlu perubahan struktur komando darurat. (lihat di atas). Selain itu, BNPB memberikan masukan terkait durasi masa tanggap darurat yang diperpendek menjadi 14 hari dari satu bulan.

[6] Nugroho Dwi Atmoko, Hasil Wawancara Informan Utama dalam Tinjauan Partisipatif, Lumajang, 2022.

2. Sistem Komando Tanggap Darurat Erupsi Semeru

Terdapat beberapa temuan penting dari tantangan terkait dengan sistem komando darurat untuk respons, antara lain:

a. Rencana operasional tidak didasarkan pada rencana kontinjensi

Kondisi kacau terjadi selama minggu pertama tanggap darurat,[7] dengan perkembangan rencana operasional (Renops) baru terjadi setelah Kepala Pusdalops BNPB memberikan bantuan kepada Posko di Pasirian.[8] Tidak hanya itu, persiapan Renops yang melibatkan beberapa pihak tidak sesuai dengan rencana kontinjensi erupsi gunung api yang ada. Alasan utamanya adalah rencana kontinjensi yang ada (yang disusun pada tahun 2015) masih menggambarkan kondisi yang berbeda dengan erupsi 2021, sedangkan Renops didasarkan pada kondisi yang ada.

Jika membandingkan dokumen rencana kontinjensi dengan Renops, struktur komando Rencana Kontinjensi menggunakan basis sektoral yang lebih lengkap, sedangkan rencana Operasional didasarkan pada SK Bupati No. 188.45/528/427.12/2021, yang hanya menyediakan struktur untuk operasi pencarian dan penyelamatan, penanganan pengungsi, kesehatan, dan logistik.

Lebih dari itu, dokumen rencana operasional ternyata tidak dikomunikasikan, yang terungkap saat wawancara dengan Joko Sambang, Kepala Bagian Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (KRR) BPBD yang menyatakan belum pernah melihat dokumen rencana operasi, meskipun beliau pernah diajak diskusi dengan Pusdalops BNPB.

Hal ini dikuatkan oleh Nugroho Dwi Atmoko (Asisten Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang) yang mengatakan sudah membubuhkan paraf pada dokumen tersebut, tetapi belum menerima fisik dokumen tersebut. “Saya yakin semua pihak juga belum memahami dokumen rencana operasional karena butuh waktu untuk mempelajarinya,” kata Nugroho.

Temuan keseluruhan adalah koordinasi tidak berlangsung baik berdasarkan rencana kontinjensi maupun rencana operasional karena tidak ada yang disosialisasikan dengan baik kepada para aktor di struktur komando, sehingga yang terjadi adalah koordinasi “setengah hati” oleh Danramil Pronojiwo karena tidak ada instruksi langsung kepada Dandim Malang.[9]

b. Struktur Posko

Saat terjadi Erupsi Gunung Semeru, kondisi Posko sangat dinamis. Pada hari pertama, posko/pos induk tanggap darurat berada di Lapangan Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, tetapi dipindahkan ke kantor Kecamatan Pasirian, sedangkan posko pengungsi dan posko logistik dibagi di empat lokasi. Di Kecamatan Candipuro terdapat Posko Lapangan Penanggal, Posko Lapangan Candipuro, dan Posko Pengungsi di Kantor Desa Pasirihan. Di Pronojiwo, posko pengungsi dan logistik berada di kantor kecamatan Pronojiwo.

[7] Tim peninjau partisipatif dalam FGD, FGD SKPDB dan Koordinasi Darurat Bencana Erupsi Semeru, Lumajang, 2022
[8] Nugroho Dwi Atmoko, Op. Cit.
[9] Patria Dwi Hastiadi, Lokakarya hasil Tinjauan Partisipatif Respons Erupsi Semeru 2021, 2022

Tidak terstrukturnya pengelolaan posko tersebut disebabkan oleh operasi relawan yang tidak teratur, dengan relawan membuat atau mendirikan posko relawan sendiri yang disebut pos, posko, sehingga mengganggu alur komando penanganan tanggap darurat erupsi Semeru.[10] Selain itu, tokoh masyarakat sangat aktif dalam merespons tetapi tidak memahami struktur posko atau di mana peran/mandat mereka di dalam struktur tersebut.

c. Posko versus Koordinasi Sektoral

Dengan kurangnya kesadaran akan Rencana Operasi, dan kurangnya pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab untuk manajemen dan tanggap darurat, serta populasi sukarelawan yang sangat besar, koordinasi tanggap darurat menjadi sulit. Misalnya, rapat koordinasi harian di Posko Pasirihan berlangsung dalam format hibrid (Luring dan Daring) dan lebih banyak melaporkan apa yang telah dilakukan hari itu, kendala yang dihadapi serta rencana ke depan. Koordinasi dipimpin oleh Komandan Satgas dan Sekretaris/Kepala Pelaksana BPBD Lumajang. Peserta rapat mempresentasikan kegiatan mereka tanpa menggunakan pendekatan klaster/sektor (sistem klaster tidak diterapkan untuk tanggap darurat ini) dan sangat sulit untuk memantau dan mengevaluasi hasil dari perspektif sektoral, atau mengoordinasikan kegiatan berdasarkan sektor.

d. Sukarelawan belum terkoordinasi dengan baik di minggu pertama

Selama seminggu pertama pasca erupsi, relawan berdatangan dari seluruh Provinsi Jawa Timur, serta daerah lain di Jawa dan Bali. Namun, tidak ada mekanisme untuk mengoordinasi para relawan, untuk menentukan siapa yang melakukan apa, di mana dan kapan.[11] Apalagi, begitu Desk Relawan dibentuk oleh Forum PRB Provinsi, tidak semua relawan/relawan kelompok terdaftar di desk atau mematuhi rekomendasi untuk memeriksa titik koordinasi atau menginformasikan sumber daya yang mereka miliki.

> *"Jalur Candipuro dan Pronojiwo seperti pasar malam yang dipenuhi posko atau pos relawan dengan berbagai nama. Tidak ada koordinasi yang terbentuk dalam penyebaran sukarelawan."*
>
> **Catur Sudarmanto** (Sekretaris Jenderal Forum PRB Jatim)

Data dan Informasi Bencana

Manajemen bencana yang efektif membutuhkan data dan informasi yang tersedia dengan cepat dan akurat tentang peristiwa dan dampak bencana. Hal ini membutuhkan pengelolaan data dan informasi bencana yang kompeten menggunakan format data standar yang dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota, menggunakan pendekatan pengelolaan data satu atap untuk memastikan akurasi dan konsistensi, dan untuk menghindari duplikasi, kebingungan atau informasi yang saling bertentangan untuk pengambilan keputusan.[12] Selama tanggap darurat, beberapa masalah dan kekurangan yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi adalah sebagai berikut:

a. Manajemen data terfragmentasi di antara kelompok pemangku kepentingan

Tidak ada titik fokus pengelolaan data pusat selama tanggap darurat, sehingga sangat sedikit data yang dikonsolidasikan di seluruh kelompok pemangku kepentingan. Seperti yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, prioritas utama pendataan adalah untuk penggunaan internal

[10] Catur Sudarmanto, Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, Lumajang, 2022
[11] *Ibid*, Catur Sudarmanto
[12] Peraturan Kepala BNPB No. 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data Bencana Indonesia, Bab II Kebijakan dan Strategi, 2021

(untuk respons logistik pangan) kemudian diberikan ke Pusdalops.[13] Hal ini juga diungkapkan oleh tim logistik, bahwa untuk melakukan pendistribusian, tim harus mengumpulkan data sendiri di tingkat desa, yang diperparah dengan sulitnya mengakses data di tingkat desa.[14]

b. Kurangnya kejelasan mekanisme koordinasi data bencana

Salah satu kendala pengelolaan data di Kabupaten Lumajang pada masa tanggap darurat adalah mengenai entitas mana yang akan bertanggung jawab, dan mekanisme apa yang digunakan untuk mengoordinasikan data dan informasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk mempublikasikan hasil akhir dari Pusdalops dalam bentuk infografis di https://tagana-semeru.lumajangkab.go.id/.[15] Sedangkan Pusdalops berfokus pada pembuatan dan pengolahan data grafis. Belum ada pihak yang mengoordinasi dan merekomendasikan data serta informasi untuk pengambilan kebijakan penanganan darurat bencana. Di sisi lain, terdaoat banyak versi dari data yang sama yang beredar, yang dikumpulkan oleh banyak pihak untuk digunakan sendiri juga. Pada saat yang sama, Pusdalops terhambat oleh kurangnya sumber daya (dengan hanya enam personel untuk mendukung tim penilaian cepat), yang harus mengoordinasikan dan menganalisis data dari berbagai pemangku kepentingan di lapangan, belum termasuk data dari aktor non-pemerintah., yang kemungkinan di luar kemampuan mereka.[16]

c. Belum adanya data terpilah, data sebaran pengungsi, data kebutuhan harian pengungsi

Ketiadaan data terpilah mengenai kebutuhan para penyintas juga menjadi tantangan utama bagi para pelaku tanggap darurat,[17] mengakibatkan tertundanya distribusi barang-barang bantuan kepada pemerintah daerah dan organisasi sukarelawan. Hal ini juga menyebabkan sulitnya untuk menentukan apakah kebutuhan logistik telah terpenuhi atau bilamana terdapat kelebihan stok bantuan di daerah-daerah tertentu.

d. Masyarakat kekurangan informasi terkait mitigasi, dan rambu peringatan dini erupsi.

Temuan utama dari proses refleksi adalah hampir tidak ada kegiatan mitigasi di masyarakat sekitar terkait erupsi gunung berapi, yang terbukti dari respons masyarakat saat peningkatan aktivitas Gunung Semeru terjadi dan saat erupsi muncul. Masyarakat melihatnya sebagai hal biasa, bukan ancaman yang harus dihindari. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lokasi yang digunakan untuk relokasi, dengan pertanyaan apakah kawasan tersebut aman dari erupsi Semeru, dan juga ancaman bencana lainnya, sehingga menimbulkan keraguan di antara penerima manfaat pemukiman untuk pindah ke rumah baru mereka.[18]

Perumahan dan Pemulihan Dini

Perumahan

Pembangunan rumah sementara ini melibatkan banyak pihak, termasuk LSM dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menciptakan lingkungan rekonstruksi yang sangat dinamis. Pada awal tahun 2022, isu utama adalah SK Bupati Nomor 188.45/29/427.12/2022 tentang Daftar Penghuni

[13] Nana Indra W., Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, 2022
[14] Saifudin, Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, 2022
[15] M. Khoirul Anam, FGD Data dan Informasi untuk tinjauan partisipatif, 2022
[16] Kustari, Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, 2022
[17] Siti Sulhunaini, Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, 2022
[18] Sinam M. Sutarno (JRKI), Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, 2022

Sementara Korban Bencana Alam Erupsi Semeru yang belum disosialisasikan. BPBD Lumajang menetapkan daftar penerima bantuan relokasi perumahan. Mitra non-pemerintah, seperti LSM, yang biasanya akan menentukan siapa penerima manfaat dari rumah yang mereka bangun, tidak senang dengan pendekatan ini karena mereka merasa kurangnya transparansi dalam pemilihan penerima, yang dapat berdampak pada program lain seperti perumahan sementara dan dukungan mata pencaharian.[19]

Pembangunan Huntara lebih lambat dari Huntap, karena daftar penerima Huntara belum disosialisasikan, tanah relokasi belum diratakan, dan biaya pembangunan rumah lebih dari perkiraan.[20] Hal ini mengakibatkan beberapa lembaga yang awalnya berkomitmen untuk membantu pembangunan Huntara menarik dukungan mereka.[21]

Namun, pembangunan perumahan berjalan cepat berkat adanya lobi, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta dukungan dari PUPR.

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kurangnya Pemahaman Akan Pentingnya Dokumen R3P di Kabupaten Lumajang

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang diamanatkan dalam Peraturan BNPB No. 5/2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang juga termasuk dalam Indikator Kinerja Utama, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan R3P di Kabupaten Lumajang awalnya tertunda karena beberapa OPD/SKPD mengira ini adalah dokumen BPBD dan tidak memerlukan masukan mereka. Baru pada pertemuan keempat OPD/SKPD memahami pentingnya dokumen ini, dan SIAP SIAGA memberikan bantuan teknis selama pengembangan dokumen, termasuk:

1. Pengumpulan data Jitupasna;
2. Lokakarya analisis dampak bencana;
3. Lokakarya analisis kebutuhan pemulihan;
4. Persiapan dokumen;
5. Sosialisasi ke pemangku kepentingan provinsi;
6. Finalisasi dokumen; dan
7. Perundang-undangan.

Menerapkan Pendekatan Pentahelix untuk Tanggap Darurat Bencana

Penanggulangan dini Erupsi Semeru yang dilakukan Bupati Lumajang yang berbagi peran dengan Wakil Bupati dan Sekda Lumajang didukung oleh BPBD Lumajang dalam melaksanakan komando pengendalian awal menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar sejalan dengan amanatnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

[19] Rodhatoryan Firdiansyah (MDMC), FGD Pemulihan Dini untuk Tinjauan Partisipatif, 2022
[20] Sutrisno (HI), FGD Pemulihan Dini untuk Tinjauan Partisipatif, 2022
[21] Nugroho Dwi Atmoko, Op. Cit.

2. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8 yang mengatur tentang (1) menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal; (2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana (3) pengurangan risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan (4) alokasi dana penanggulangan bencana dalam anggaran belanja daerah yang memadai.

Manajemen tanggap darurat juga memastikan pendekatan 'pentahelix'. Dalam SKPDB, strategi respons dan pemulihan dipimpin oleh Fokompimda dan OPD/SKPD. Lapisan kedua dari sistem tanggap darurat adalah Forum PRB Jatim dan Desk Relawan yang menyediakan data pendukung sebagai dasar penyusunan kebijakan darurat. Lapisan ketiga adalah LSM, CSO, dan relawan yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat. Lapisan keempat terdiri dari fungsi pendukung BPBD Jawa Timur dan BNPB, dibantu oleh SIAP SIAGA.

Dalam konteks pengelolaan data dan informasi, aktor utamanya adalah Pusdalops, Kodim, Polres, dan Diskominfo, yang mempublikasikan data dan informasi di http://tagana.lumajangkab.go.id. Pengumpulan dan koordinasi data didukung oleh Desk Relawan Forum PRB Jawa Timur (yang mengumpulkan informasi dari CSO dan LSM) dan SIAP SIAGA. Informasi lebih lanjut disebarluaskan melalui media

Penyusunan dokumen R3P dipimpin oleh BPBD Lumajang dengan dukungan tim Jitupasna yang ditugaskan oleh SK tersebut, yang terdiri dari pemangku kepentingan dari OPD terkait dan Forum PRB. Proses penyusunan R3P juga menjadi landasan untuk menilai kembali metode Jitupasna sambil mempersiapkan dokumen, dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, BPBD Jawa Timur dan SIAP SIAGA memberikan dukungan dan bantuan selama proses berlangsung.

Isu Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) selama Tanggap Darurat

Tanggap darurat Semeru memberikan wawasan penting tentang kekurangan yang terus berlanjut dalam pengarusutamaan GEDSI dalam manajemen bencana, tetapi juga kemajuan yang nyata. Salah satu kekurangan utama adalah memastikan partisipasi perempuan, kelompok rentan dan terpinggirkan dalam kegiatan respons dan pemulihan. Hal ini terutama terlihat dalam kaitannya dengan SK yang terkait dengan lokasi relokasi perumahan, yang berdampak pada kapasitas penerima manfaat untuk memastikan kelangsungan mata pencaharian mereka (jika mereka berada di pertambangan atau pertanian), atau pendapatan berbasis rumahan lainnya, terutama bagi perempuan, yang akan memiliki lebih sedikit akses ke persediaan, pemasok, dan pembeli untuk produk/layanan mereka.

Gambar 4: *Leaflet yang mengiklankan kanal pengaduan untuk korban erupsi Semeru*

Namun, pemerintah memastikan bahwa penyandang disabilitas dikonsultasikan dalam desain perumahan, termasuk meminimalkan jumlah tangga, memastikan tidak ada saluran pembuangan terbuka, dan memudahkan orang di kursi roda untuk berkeliling –menciptakan lingkungan lingkungan perumahan dan masyarakat yang lebih inklusif.[22] Proses ini membutuhkan pemutakhiran data penerima manfaat, untuk dipilah berdasarkan disabilitas demi memastikan mereka dialokasikan perumahan yang dapat diakses dan memiliki akses ke fasilitas umum yang diperlukan.

Pada fase tanggap darurat, tim lintas OPD di Kabupaten Lumajang yang didukung oleh Kementerian KPPPA dan DP3AK Jawa Timur diaktifkan untuk mendukung mekanisme pengaduan para penyintas erupsi Semeru. Posko pengaduan juga didukung oleh UNFPA, Wahana Visi dan Dompet Duafa. Dilanjutkan dengan pembentukan sub klaster Kabupaten untuk Pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Anak (PP KBG & PA) pada masa transisi ke tahap pemulihan, sesuai SK Bupati. Sub klaster ini berperan penting dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, kelompok rentan dan terpinggirkan.

[22] Tri Febri KN, Lokakarya Pemaparan R3P Erupsi Semeru, Surabaya. 2022

Pendekatan untuk Mengatasi Kekurangan dan Tantangan

Dua minggu pertama masa tanggap darurat Semeru terindikasi agak kacau, tetapi dengan cepat diatasi melalui kepemimpinan lokal. Seperti disebutkan di atas, banyak tantangan muncul pada minggu-minggu awal setelah erupsi, dan solusi telah diidentifikasi serta diterapkan, sebagai berikut:

1. Menyadari **perlunya revisi SK Darurat** berdasarkan informasi terkini dan masukan dari BNPB
2. **Inisiasi koordinasi Manajemen Informasi**.[23] Meskipun sistem klaster tidak terlihat selama respons, kebutuhan akan koordinasi data dan informasi tampak jelas. Pusdatinkom BNPB dan UNFPA melakukan pendataan terpilah di 30 titik pengungsi antara 9-14 Desember 2021 menggunakan Survey123 dan hasilnya dirilis melalui https://gis.bnpb.go.id/semeru2021/. Untuk memastikan data diperbarui setiap hari, koordinator pos pengungsi diajari cara menggunakan Survey123. Selain itu, 24 lembaga kemanusiaan melakukan Penilaian Kebutuhan Gabungan (JNA)[24] untuk mendapatkan data gabungan untuk sembilan sektor.
3. **Penyusunan Rencana Operasional**. Rencana Operasional dikembangkan meskipun tidak ada Rencana Kontinjensi. Dengan dukungan tim Pusdalops BNPB, Pemkab Lumajang dan Komando Darurat menyusun Rencana Operasional erupsi Gunung Semeru berdasarkan penilaian cepat, dan informasi yang muncul dari rapat koordinasi harian, serta dasbor yang dikelola BNPB Pusdatinkom dan UNFPA. Namun, Rencana tersebut tidak efektif dilaksanakan karena kelompok pemangku kepentingan utama, seperti instansi pemerintah utama (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Diskominfo), Forum PRB dan LSM lainnya, tidak terlibat dalam persiapan, dan banyak kekurangan dalam operasi karena kurangnya informasi.
4. **Mengoordinasi Relawan Melalui Desk Relawan.**[25] Mengingat banyaknya relawan dan organisasi yang datang untuk mendukung tanggap darurat, Forum PRB Jatim dan SIAP SIAGA dibantu oleh BNPB membentuk Desk Relawan dengan tujuan untuk mendaftarkan relawan dan mengarahkan kegiatan mereka sesuai dengan kompetensi dan sumber daya mereka.
5. **Radio Darurat sebagai sarana komunikasi publik dan transparansi**. Karena kurangnya informasi tentang bencana (kesiapsiagaan bencana, peringatan dini serta informasi tentang strategi pemerintah untuk respons dan pemulihan), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) mendirikan channel radio darurat bernama “Radio Lintas Semeru”, dengan tujuan untuk memitigasi kekurangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Radio komunitas merupakan sarana yang efektif untuk mensosialisasikan tanggap darurat dan proses pemulihan kepada masyarakat.

[23] Septian Firmansyah, Laporan Respons Tanggap Darurat dalam Bencana Awan Panas dan Guguran (APG) Gunung Semeru, 2021
[24] JNA Survey members are HFI, Human Initiative (HI), WVI, East Java DRR Forum, CRS, DMC, Dompet Duafa, Mercy Corps Indonesia, Habitat For Humanity, Ruah Zakat, WFP, Predikt, IFRC, Sheep Indonesia, Save the Children, YEU, cbm, PMI, YKMI, Caritas Indonesia, Unicef, National Secretariat of SPAB, MDMC, LPBI NU
[25] Catur Sudarmanto, Op. Cit

Pelajaran yang Dipetik

Erupsi Gunung Semeru berdampak besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, proses tanggap darurat dan pemulihan memberikan wawasan dan pelajaran penting untuk manajemen bencana (darurat) yang lebih luas, terutama terkait dengan erupsi gunung berapi.

1. SK darurat, struktur komando dan koordinasi harus didasarkan pada informasi terbaru untuk memperbaiki dan memperkuat proses tanggap darurat dan pemulihan.

2. Kesadaran dan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab penanggulangan bencana, khususnya di tingkat kabupaten, sangatlah penting untuk memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik di antara pemangku kepentingan pemerintah pada tingkat pertama, dan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam konteks yang lebih luas, menciptakan ruang untuk pendekatan koordinasi klaster yang efektif untuk tanggap bencana.

3. Pembentukan Desk Relawan di tingkat kabupaten merupakan langkah penting untuk memastikan respons dan pemulihan bencana yang transparan dan efektif. Operasi Desk Relawan dapat didukung oleh BPBD serta Forum PRB lokal, yang menunjukkan ruang untuk kolaborasi *multi-stakeholder*. Desk Relawan juga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kapasitas non-pemerintah yang ada untuk penanggulangan bencana di daerah yang terkena bencana, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya selama operasi tanggap darurat.

4. Pengelolaan data yang terkoordinasi dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan korban dan penyintas diidentifikasi dan dipenuhi dengan jelas, dan sumber daya tidak terbuang sia-sia. Format sederhana untuk pengumpulan dan pelaporan data kepada 'koordinator' data sangatlah penting, terutama bagi pelaku non-pemerintah, untuk memastikan pemrosesan, analisis, dan penggunaan data yang lebih terintegrasi guna pembuatan dan perencanaan kebijakan.

5. Faktor utama yang mempengaruhi kecepatan penyediaan perumahan adalah keterlibatan langsung KLHK dalam alokasi lahan dan PUPR pada desain perumahan (inklusif), kondisi sosial dan fasilitas perumahan. Pembangunan 1.951 Huntap pasca erupsi Gunung Semeru selesai dalam waktu enam bulan setelah bencana, memenuhi target pemerintah. Faktor akselerasi antara lain koordinasi dan komunikasi yang intens antara pejabat Lumajang dan pemerintah pusat; respons cepat KLHK melalui Surat No. 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Hunian Korban Erupsi Gunung Semeru dan Lahan Usahanya atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Kawasan Hutan Produktif Tetap di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur seluas 90,98 Ha, pada 14 Desember 2022.[26] Selain itu, pesatnya penerbitan izin penggunaan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut mempengaruhi PUPR untuk melakukan pembangunan hunian tetap yang juga dimulai bersamaan dengan pembangunan hunian sementara.

6. Penyusunan dokumen R3P yang tepat waktu (dalam target 90 hari yang disepakati dengan BNPB) memastikan bahwa perencanaan pemulihan pascabencana tidak kehilangan momentum, sementara keterlibatan *multi-stakeholder* dalam penyusunan dokumen R3P memastikan dukungan sektoral yang diperlukan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pemulihan. Klarifikasi peran dan tanggung jawab antar OPD/SKPD di awal proses, serta fasilitasi koordinasi oleh BPBD Jawa Timur dan BNPB, merupakan faktor penting dalam

[26] Puguh Budi L (Bappeda), Wawancara informan utama dalam tinjauan partisipatif, 2022

penyelesaian tepat waktu dari rencana tersebut. Bantuan teknis yang diberikan oleh SIAP SIAGA dalam prosesnya, termasuk klarifikasi peran dan tanggung jawab, juga mempengaruhi kecepatan penyelesaian dokumen.

7. Masih ada kekurangan dalam pengarusutamaan GEDSI dalam tanggap darurat, namun kesadaran akan kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan telah mendorong lebih banyak komitmen dari pemerintah untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi, termasuk penyebaran informasi dan partisipasi mereka dalam perencanaan proses yang secara langsung berdampak pada mereka, seperti perumahan dan mata pencaharian. Namun, masih banyak yang harus dilakukan.

Rekomendasi

Berdasarkan masukan dan analisis hasil dari Tinjauan Partisipatif, rekomendasi berikut telah dikembangkan untuk pertimbangan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah:

1. Meninjau dan menyiapkan Rencana Kontinjensi untuk erupsi gunung berapi berdasarkan pengalaman peringatan dini, respons dan pemulihan Semeru, dan menguji rencana tersebut melalui TTX.

2. Menyiapkan dokumen kebencanaan lainnya (Penilaian Risiko Bencana, Rencana Pengelolaan Bencana (RPB), Rencana Pengelolaan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontinjensi per Ancaman) sebagai dasar kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang.

3. Mensistematisasikan koordinasi dan komunikasi lintas pihak penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang, khususnya dengan kementerian teknis seperti BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM. Hal ini akan dibarengi dengan pembentukan klaster penanggulangan bencana permanen di Kabupaten Lumajang.

4. Mengutamakan pengelolaan data terpadu dari tingkat desa hingga kabupaten, dengan menggunakan pendekatan Satu Data Bencana. Hal ini dapat disertai dengan Surat Keputusan untuk membentuk kelompok kerja tetap pengelolaan data kebencanaan, serta tim Jitupasna lintas sektor tetap.

5. Memprioritaskan integrasi pedoman pengarusutamaan GEDSI, termasuk mekanisme penanganan pengaduan, ke dalam dokumen dan praktik penanggulangan bencana (kelompok kerja, mekanisme koordinasi, kegiatan penyadaran/informasi).

6. Membentuk Desk Relawan setempat untuk mensistematisasikan upaya pendataan relawan dan organisasi relawan di daerah, serta mendukung integrasi data non-pemerintah ke dalam kegiatan Satu Data Bencana.

Rekomendasi ini akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbarui/menyesuaikan peraturan penanggulangan bencana, termasuk SPM, serta peraturan daerah, menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah dan mendukung persiapan dokumen penanggulangan bencana yang diperlukan.

Lampiran 1: Wawancara Informan Utama

Nama	Tanggal Wawancara	Jabatan	Lembaga
Joko Sambang	5 April 2022	KABID. KRR	BPBD Kabupaten Lumajang
Am. Ridwan	5 April 2022	KETUA	LPBI NU PCNU Lumajang
Ir. Nugroho Dwi Atmoko	6 & 14 April 2022	Asisten Administrasi	Sekda Kabupaten Lumajang
Nana Indra W. S.H	6 April 2022	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
Saifudin/Lusi	6 April 2022	Kasubid Logistik/Staf	BPBD Kabupaten Lumajang
Siti Sulhunaini	6 April 2022	Anggota	FPRB Lumajang
Sinam S. Sutarno	7 April 2022	Ketua	JRKI (Penanggungjawab Radio Darurat JRKI) Curah Kobokan
Mambaus Suud	9 April 2022	Konsultan	SIAP SIAGA Jawa Timur
Kustari Sumardi	5 April 2022	Staf Pusdalops Lumajang	BPBD Kabupaten Lumajang
Dino Andalanto	7 April 2022	Manajer Pusdalops	BPBD Jawa Timur
Puguh Budi L	8 April 2022	Kabid RSIK	Bappeda Kabupaten Lumajang
Patria Dwi Hastiadi	4 April 2022	Kalaksa	BPBD Kabupaten Lumajang
Sudarmanto		Sekjend	FPRB Jawa Timur
Alvin (Zainal Fatah)		Desk Relawan	FPRB JATIM
Eli Sunarso	6 April 2022	Ketua Tanggap Darurat	Yakum Emergency Unit
Tri Febri Kn	14 April 2022	Koordinator	Pertuni
M. Agung Haryono P. Skm	14 April 2022	Kasi Bina Kader Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lampiran 2: Diskusi Kelompok Terfokus

FGD Koordinasi dan Deklarasi Status Darurat

Nama	Organisasi
Mart Widarto	Siap Siaga Jawa Timur
Mambaus Su'ud	Siap Siaga Jawa Timur
Rahmat Setiawan	BPBD Lumajang
Catur Sudharmanto	Forum PRB Jawa Timur
Nurhadi Santoso	PMI Lumajang
M. Khoirul Anam	Dinas Kominfo Lumajang
Rodhatoryan Firdiansyah	MDMC Lumajang
Sudarmadi	Polres Lumajang
Sarjono	Kodim 0821
Zainal Fatah	Forum PRB Jawa Timur
Sulehati	Dinas Sosial Lumajang
Siti Sulhunaini	Forum PRB Jawa Timur

FGD Pengelolaan Data dan Informasi

Nama	Organisasi
Mambaus Suud	Siap Siaga Jawa Timur
Rahmat Setiawan	BPBD Lumajang
Catur Sudharmanto	Forum PRB Jawa Timur
Bambang Sasongko	MCS Yogyakarta
Mart Widarto	Siap Siaga Jawa Timur
Zainal Fatah	Forum PRB Jawa Timur
M. Khoirul Anam	Diskominfo Lumajang
Sulihati	Dinas Sosial Lumajang
Siti Sulhunaini	Forum PRB Jawa Timur
Kustari Sumardi	BPBD Kabupaten Lumajang

Lampiran 3: Daftar Pustaka

Sumber	Tautan
Media Pemberitaan	
Presiden pada tanggal 5 Desember 2021 memerintahkan Kepala BNPB, Kepala BASARNAS, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin dalam melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana Erupsi Semeru Lumajang.	https://www.youtube.com/watch?v=b0502LB2-nY, diakses 25 Juli 2022
Bantuan Kemensos bagi Korban Bencana Erupsi Semeru	https://kemensos.go.id/bantuan-kemensos-bagi-korban-bencana-erupsi-semeru-hingga-10-desember-total-rp-2816327950, 16 April 2022
Menkeu perintahkan Kemenkeu member dukungan Anggaran	https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-instruksikan-kemenkeu-siapkan-dukungan-anggaran-tangani-dampak-erupsi-gunung-semeru/, 16 April 2022
Tanggap darurat erupsi Semeru, kementrian PUPR terjunkan tim	https://regional.kontan.co.id/news/tanggap-darurat-erupsi-semeru-kementerian-pupr-turunkan-tim-dan-alat-berat, 16 April 2022.
Penutupan Opsar Erupsi Semeru	https://www.antaranews.com/berita/2591349/operasi-sar-korban-awan-panas-guguran-gunung-semeru-ditutup, 16 April 2022
Peraturan Pemerintah	
Rencana Kontingensi Erupsi Semeru 2015-2017	
Draft Rencana Operasi Erupsi Gunung Semeru	
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/524/427.12/202	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru (3 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022)
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/527/427.12/2021	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru (4-17 Desember 2021)
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/528/427.12/2021	Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/29/427.12/2021	Daftar Hunian Sementara Korban Bencana Alam Erupsi Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/549/427.12/2021	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
SK Mentri LH dan Kehutanan RI Nomor 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	Penetapan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Penampungan Sementara Korban Bencana Alam Erupsi Semeru dan Lahan Usahanya atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang Pada Kawasan Hutan

	Produksi Tetap di Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur Seluas +- 90,98 HA
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/552/427.12/2021	Daftar Rumah Rusak Dampak Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/556/427.12/2021	Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/475/427.12/2021	Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/557/427.12/2021	Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/92/427.12/2022	Tim Penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Erupsi Gunung Semeru
SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/248/427.12/2022	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PAsca Bencana Erupsi Gunung Semeru
Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lumajang 2018-2022	
Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017	

SIAP SIAGA

Australia - Indonesia Partnership
for Disaster Risk Management

TINJAUAN PARTISIPATIF RESPONS ERUPSI GUNUNG SEMERU

Pelajaran yang Dipetik dan Laporan Rekomendasi